

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN NOTARIS YANG MERANGKAP
TUGAS SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN NAGARI (Studi
Kasus Kabupaten Dharmasraya)**

TESIS

*Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Diajukan oleh:

RIFDAL FADLI, S.H

NIM. 1820123026

PEMBIMBING:

- 1. Dr. DAHLIL MARJON, S.H., M.H**
- 2. Dr. YUSSY ADELINA MANNAS, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN NOTARIS YANG MERANGKAP TUGAS SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN NAGARI (Studi Kasus Kabupaten Dharmasraya)

(Rifdal Fadli, NIM. 1820123026, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pembimbing I Dr.Dahlil Marjon, SH.,MH Pembimbing II Dr.Yussy Adelina Mannas, SH.,MH vi + 96 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, Kepastian Hukum pengaturan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Termasuk juga untuk notaris-notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara, dalam hal ini adalah badan Permusyawaratan Desa atau Nagari (BAMUS). Kepastian Hukum Pengaturan Notaris Yang merangkap Tugas sebagai Anggota Badan Permusyaran Nagari Studi Kasus Kabupaten Dharmasraya menjadi judul dari tesis ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Penelitian ini merupakan peneitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Hasil penelitian ini adalah:

(1) Bagaimanakah Kepastian Hukum Pengaturan Notaris yang merangkap tugas Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan dianalisis berdasarkan UJUN yaitu, Kepastian hukum pengaturan Notaris yang merangkap tugas sebagai anggota badan permusyawaratan Nagari masi ada kekaburan hukum dikarenakan dalam Pasal 17 UUJN tidak ada larangan Notaris rangkap jabatan sebagai anggota badan permusyawaratan nagari, namun dalam Pasal 16 UUJN Notaris dalam menjalankan Tugas wajib bersikap adil, jujur, netral dan tidak berpihak, namun dengan notaris merangkap jabatan sebagai Badan permusyawaratan nagari akan menimbulkan indikasi keberpihakkan dan benturan kepentingan

(2) Bagaimanakah Akibat Hukum Notaris yang Merangkap tugas Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu, Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara yaitu terdegradasinya akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan serta dikenakan sanksi-sanksi berupa diberhentikan sementara 3 bulan oleh Majelis Pengawas Wilayah setempat kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan putusannya melalui sidang terbuka memberikan sanksi yaitu diberhentikan sementara 6 bulan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pengaturan Notaris, Merangkap Tugas, Anggota Badan Permusyaran Nagari

**LEGAL CERTAINTY OF REGULATION OF NOTARIES WHO CONFIRM DUTY
AS MEMBERS OF THE NAGARI CONSULTANCY AGENCY
(Case Study of Dharmasraya Regency)**

(Rifdal Fadli, NIM. 1820123026, Notary Masters Study Program, Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University, Supervisor I Dr. Dahlil Marjon, SH., MH Supervisor II Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH vi + 96 pages, 2022)

ABSTRACT

Notaries as one of the bearers of the legal profession are people who have expertise and knowledge in the notarial field, so that they are able to meet the needs of the community who need services in the notarial field. Since the presence of the Notary Institution in Indonesia, legal certainty regarding the regulation of Notaries has always been carried out by the judiciary and the government. This includes notaries who hold concurrent positions as state officials, in this case the Village Consultative Body or Nagari (BAMUS). Legal Certainty Arrangements for Notaries Who concurrently Duties as Members of the Nagari Consultative Body. The case study of Dharmasraya Regency is the title of this thesis. The type of research used in this research is legal. with other research. The legal research method is a systematic way of conducting research. The results of this study are:

(1) How is the legal certainty of the arrangement of a notary who concurrently has duties as a member of the deliberative body analyzed based on the UUJN, namely, the legal certainty of a notary setting who has concurrent duties as a member of the Nagari deliberative body, there is still legal ambiguity because in Article 17 UUJN there is no prohibition of a notary having concurrent positions as a member of the agency. Nagari requirements, but in Article 16 UUJN Notaries in carrying out their duties are required to be fair, honest, neutral and impartial, but with a notary concurrently serving as a Nagari Consultative Body, it will give rise to indications of partiality and conflict of interest.

(2) What are the legal consequences of a Notary who has concurrent duties as a Member of the Nagari Deliberative Body based on positive law in Indonesia, namely, a Notary who holds concurrent positions as a State Official, namely the degradation of the deed he made into an underhand deed and is subject to sanctions in the form of being temporarily dismissed for 3 months by The local Regional Supervisory Council is then followed up by the Notary Central Supervisory Council with its decision through an open trial giving a sanction, namely being temporarily suspended for 6 months.

Keywords: Legal Certainty, Notary Arrangements, Concurrently Duties, the Nagari Consultative Body